



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021**



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri berkomitmen dan sungguh-sungguh berupaya untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Menyediakan akses informasi publik yang mudah, murah dan dapat diakses oleh masyarakat;
4. Menyediakan sarana dan fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman sesuai standar pelayanan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja internal dalam pelayanan informasi publik;
6. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Visi PPID

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka, Informatif dan Akuntabel di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Misi PPID

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif;

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik nasional.

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi publik.

Memberikan pelayanan informasi secara tepat, cepat, mudah dan sederhana.



1 | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hukum hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tata kelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada di bawah kewenangan Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat dihadapkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tata Kelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik serta tertutupnya data-data yang dikuasai oleh Badan Publik. Sejak disahkannya UU KIP, pendekatan pengelolaan informasi yang semula berprinsip "semua informasi tertutup kecuali informasi yang terbuka" berubah menjadi "semua informasi terbuka kecuali informasi tertutup", diharapkan bisa meningkatkan tata Kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan negara dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran pengawasan masyarakat khususnya dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi publik. Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun pedoman dalam

Pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri juga telah menyusun draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Layanan Informasi Publik yang dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta untuk mengakomodir aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah lainnya terkait struktur PPID dan system informasi layanan informasi publik.



2 | GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan yang berkedudukan sebagai PPID Utama.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pembina ;

2. Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Utama; dan

3. Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Pembantu.

Struktur Organisasi PLID Kementerian Dalam Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina PPID, Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID, Pejabat Eselon I dari setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri beserta dengan Kepala Biro Hukum sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Pusat Penerangan sebagai PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan unit Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/ Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai PPID Pembantu. Masing-masing PPID Pembantu menunjuk pejabat/staf sebagai Person in charge (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang menjalankan pelayanan informasi publik sebagai admin aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri yang aktif.



STRUKTUR ORGANISASI PPID DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



2.1

Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Semua permohonan informasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung telah diakomodir sedemikian rupa agar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. 4 Kursi Tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 unit telepon;
 - e. 2 lemari arsip;
 - f. 1 filling cabinet;
 - g. Dan perlengkapan registrasi dan perkantoran standar lainnya.
2. Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: ppid@Kementerian Dalam Negeri.go.id;
3. Portal/website PPID Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id> dan aplikasi mobile PPID Kemendagri di Google Playstore

2.2

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri berada di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Pranata Humas ahli muda.



Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas informasi di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri berjumlah 10 orang PNS dan 4 Orang Tenaga Lepas Pelayanan Informasi Publik.

Petugas Tenaga Lepas yang melayani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor: 900.05-12 BKA tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Pada Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 dan kontrak kerja Pengangkatan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2021 dengan kualifikasi Pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan S1 Ilmu Komputer.

2.2

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2021, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Layanan Data dan Informasi sebesar Rp. 415.617.000,- Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Penyelesaian Permasalahan Sengketa Informasi. Selain itu PPID juga menggunakan sub anggaran Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 1.169.982.000,-** dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda.

Anggaran yang dikelola oleh PPID Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2021 dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan untuk memberikan asistensi atau pendampingan bagi Pemerintah Provinsi yang masih masuk dalam kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif.



3 RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Kementerian Dalam Negeri melalui PPID telah memberikan pelayanan informasi publik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung Kementerian Dalam Negeri menyediakan ruang layanan informasi publik. Namun selama pandemi Covid-19 tahun 2021, Pemohon Informasi lebih mengoptimalkan kanal permohonan informasi secara tidak langsung, yaitu email ppid@kemendagri.go.id dan website ppid.kemendagri.go.id.



Selama tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah menerima sejumlah 477 Permohonan informasi dengan rincian 379 permohonan informasi yang diterima melalui website, 98 permohonan informasi yang diterima melalui email dan 0 permohonan informasi yang diterima secara langsung.

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri melalui website selama Tahun 2021:

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Informasi Yang Dimohon	Cara Mengakses Informasi
1	Hery Kuswanto	01 Januari 2021	Nomor Kartu Keluarga	Website
2	Lindawati	01 Januari 2021	Pemeringkatan Hasil EKPPD Terhadap LPPD 2018	Website
3	Irmansyah	01 Januari 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021	Website
4	Rifky Andika J	01 Januari 2021	Praktik Kerja Lapangan	Website
5	Tri Utami	01 Januari 2021	Informasi Nomer Kartu Keluarga	Website
6	Andre Iansyah	01 Januari 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015-2019	Website
7	Reny Marliadi	01 Januari 2021	LRA - LKPD Provinsi Untuk Periode 2015 s.d 2019	Website
8	Broto Pramono Istianto	01 Januari 2021	Jumlah Peristiwa Konflik Dari Tahun 2016 s.d 2020	Website

9	Enggi Erlanda	01 Januari 2021	Nik Tidak Terdaftar	Website
10	Aka Juaini	01 Januari 2021	Rekapitulasi Data DP4 Jumlah Keseluruhan Penyandang Disabilitas di Indonesia Dalam Pilkada Serentak 2020	Website
11	A. Eka Ifitah	01 Januari 2021	Realisasi Pendapatan PADes (Tahun Anggaran 2015-2019), Pendapatan Transfer (DD, ADD, Bagi Hasil) LRA Desa (2015-2019), Data Penduduk Miskin Desa (Desa, Kecamatan, Kab) Tahun 2015-20	Website
12	Sudarwan	01 Januari 2021	Pembatalan SK Pelantikan 8 Pejabat di kota Bengkulu	Website
13	Junaidi Rachman	01 Januari 2021	Permohonan Data Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2018	Website
14	Antonius Agus Budi Prasetyo	01 Januari 2021	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2018 s/d 2019	Website
15	Junaidi Rachman	01 Januari 2021	Permohonan data EKPPD	Website
16	Khadijah Zena Septyorini	01 Januari 2021	Penjelasan Ketentuan Permendagri 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Website
17	Khadijah Zena Septyorini	13 Januari 2021	Penjelasan Ketentuan Permendagri 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Website
18	Moh Dingin Huda Salam	15 Januari 2021	Permendagri 77 2020	Website
19	Riska Amalia Sari	16 Januari 2021	Skor EPPD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	Website

20	Amal Akbar Yasser Arafat	19 Januari 2021	Penjelasan Pertimbangan Rasionalisasi Penyesuaian Belanja pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020	Website
21	Arif Tastas Harahap	20 Januari 2021	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1/5411/Sj (27 Juni 2019)	Website
22	Nur Ariska	20 Januari 2021	Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa dari Tahun 2017-2019	Website
23	Zainal Fanani	23 Januari 2021	Nomor Telpon Subdit. Badan Layanan Umum Daerah	Website
24	Gita Safitri	25 Januari 2021	Buku Peresmian Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB) Tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri, tgl. 31 Desember 1977	Website
25	Gita Safitri	26 Januari 2021	Buku Pedoman Pelatihan Pembahuruan Bangsa	Website
26	Rendy Warsono	26 Januari 2021	Penghapusan NIK ganda	Website
27	Yani Parasti Siregar	29 Januari 2021	Permohonan Data Nama, Agama/Kepercayaan, Jenis Kelamin, dan Tahun Lahir Walikota dan Bupati di Indonesia dari tahun 2005-2020	Website
28	Yani Parasti Siregar	30 Januari 2021	Permohonan Data Nama, Agama/Kepercayaan, Jenis Kelamin, dan Tahun Lahir Walikota dan Bupati di Indonesia dari Tahun 2005-2020	Website

29	Arttika Rahma Sari	30 Januari 2021	Skor Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 s/d 2019 Seluruh Pemerintah Daerah Indonesia	Website
30	Muhammad Abu Bakar	10 Februari 2021	Daftar Nama Lembaga Non Pemerintah Yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi Kemendagri Untuk Penyelenggara Bimtek Aparatur Desa	Website
31	Galan Nur Subhi	11 Februari 2021	Kepmendagri Tentang EKPPD terhadap LPPD 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2019	Website
32	Tigor Hadiat Hondo	13 Februari 2021	Kartu keluarga	Website
33	Makmur, S.Si	14 Februari 2021	Permohonan Data Luas Wilayah perkecamatan di Kabupaten Gorontalo	Website
34	Galan Nur Subhi	18 Februari 2021	Data Evaluasi Implementasi SIMDA Keuangan (E-Budgeting)	Website
35	Junirianto	22 Februari 2021	Hard Copy/Soft Copy Dokumen Kontrak pada Pengadaan Paket pada SKPD Dinas Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Timur TA 2017-2019: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Rencana Anggaran Biaya	Website
36	Junirianto	22 Februari 2021	Permohonan Informasi Publik	Website
37	Daffa Hadyansha	22 Februari 2021	Wewenang Kepala Desa	Website
38	Nurul Ainun	23 Februari 2021	Nomor Kartu keluarga	Website
39	Tiffany	25 Februari 2021	Permohonan Pengecekan KK	Website

40	Johusua F. Likko	25 Februari 2021	Mengetahui No KK	Website
41	Sri Suyamti	25 Februari 2021	Kartu keluarga	Website
42	Ikhwan	26 Februari 2021	Perubahan Data Kartu Keluarga	Website
43	Fauziah Muliani	01 Maret 2021	Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2020	Website
44	Wanda Gina Octarina	01 Maret 2021	Skor Pencapaian EKPPD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2016-2019	Website
45	Endang Sejati	02 Maret 2021	Skor Pencapaian EKPPD 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019	Website
46	Zainal Musthapha	02 Maret 2021	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan	Website
47	Sobrotul Imtikhanah	03 Maret 2021	Mhn Berkenan Memberikan Data LAKIP Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2017-2019	Website
48	Zainal Fanani	05 Maret 2021	Nomor Telpon Subdit. Badan Layanan Umum Daerah	Website
49	Agung Dwi Prakoso	09 Maret 2021	Kehilangan Data Diri	Website
50	Aloysius Gunadi Brata	12 Maret 2021	Data Innovative Government Award (IGA) 2020	Website
51	Arman Risma Yudha	13 Maret 2021	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.28/HGU/DA/85	Website
52	Komang Adi Kurniawan Saputra	16 Maret 2021	Jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Indonesia	Website
53	Iwan Haeruman	16 Maret 2021	Permohonan Pindah Online	Website
54	Indah Sani Saffanah	16 Maret 2021	Laporan EKPPD	Website

55	Asaeli Gea	20 Maret 2021	Surat Pertanggungjawaban APB Desa Desa Silima Banua Tahun 2017 s.d 2020	Website
56	Asaeli Gea	20 Maret 2021	Hasil Pemeriksaan Reguler dan Audit Dana Desa Silimabanua Kecamatan Tuhemberua Kab. Nias Utara Tahun 2017 s.d 2021	Website
57	Yaya Sopian	20 Maret 2021	NIK KTP Tidak Valid	Website
58	Dini Kurnia Ary Murti	20 Maret 2021	Informasi Pembukaan CPNS 2021 di Kota Ambon Provinsi Maluku	Website
59	Khadijah Zena Septyorini	21 Maret 2021	Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada OPD/SKPD	Website
60	Bingah Amarwata Sujana	21 Maret 2021	Pertanyaan terkait Pemanfaatan BMD dengan Skema KSPI	Website
61	Riki Setiawan	23 Maret 2021	KK	Website
62	Ken Yulita Mauliy-dina Kusumarini	24 Maret 2021	Data Pembentukan Daerah Indonesia s.d 2020	Website
63	Ken Yulita Mauliy-dina Kusumarini	25 Maret 2021	Daftar Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Yang Menjabat Pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Dan Kalimantan Periode 2010-2015 dan Daftar Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Yang Menjabat Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera dan Kalimantan Periode 2015-2020	Website
64	Ken Yulita Mauliy-dina Kusumarini	25 Maret 2021	Jumlah SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan sampai dengan Tahun 2019	Website

65	Talitha Syahda Amany	25 Maret 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015-2020	Website
66	Ahmat Jum'at Siregar	28 Maret 2021	Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Website
67	Reynaldo Enrique	29 Maret 2021	Kartu Keluarga Terbaru	Website
68	Roni Bagus Saputro	29 Maret 2021	Pembuatan Kartu Keluarga baru	Website
69	Talitha Syahda Amany	30 Maret 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD Tahun 2008-2014	Website
70	Aisyah Nurrul Jannah	31 Maret 2021	Laporan Dan Rincian Data Pemberian Insentif Perpajakan Oleh Setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten Dan Kota) Kepada Pelaku Usaha Pada Tahun 2020	Website
71	Aji Hendratmojo	31 Maret 2021	Kartu Keluarga	Website
72	Saiful Kapitan Leutuan	02-Apr-21	Akte kelahiran	Website
73	Ahmad Sururi	02-Apr-21	kartu keluarga	Website
74	Andre Iansyah	03-Apr-21	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015-2019	Website
75	Alfero Barus	05-Apr-21	Ingin mengganti KTP lama	Website
76	Hasna Noor Alifa	06-Apr-21	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2008-2013 Dan 2018-2020	Website

77	Kresna	07-Apr-21	Risalah Rapat Kemendagri 2020	Website
78	Kresna	07-Apr-21	Dokumen Kontrak Pengadaan Blangko KTP Elektronik Sebanyak 7.000.000 Keping TA 2017	Website
79	Ihsan Daffa Hendriawan	07-Apr-21	Kepmendagri Tahun 2019 Tentang EKPPD Tahun 2018	Website
80	Rahmanda Widyadhari	12-Apr-21	Permohonan Informasi Data Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2016-2021	Website
81	Aga Yuana	12-Apr-21	KK	Website
82	Avenia Febri Pradita	15-Apr-21	Data Pembangunan Infrastruktur di Papua	Website
83	Mutiara Shofiyahatusya'diah	15-Apr-21	Pertanyaan Seputar Program Magang	Website
84	Melani Dwi Safitri	15-Apr-21	EKPPD dan LPPD Nasional Tahun 2019	Website
85	Aga Yuana	16-Apr-21	No KK	Website
86	Putri Irfiani Mustarifah	16-Apr-21	Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	Website
87	Hari Nuryanto	19-Apr-21	SK Penetapan Mutasi	Website
88	Baries Ferryono, S.E.	19-Apr-21	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Website
89	Baries Ferryono, S.E.	19-Apr-21	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Website
90	Regina Farahzain	19-Apr-21	Data Informasi Fasilitas Dan Anggaran Kesehatan Kota Cirebon	Website

91	Andhika Permana Putra	20-Apr-21	Tanya Nomor KK	Website
92	Andhika Permana Putra	20-Apr-21	Tanya Nomor KK	Website
93	Ahmad Fauzi	20-Apr-21	Pengecekan Nomor KK	Website
94	Muthia Zahira Rachman	21-Apr-21	Dokumen Pembentukan Daerah-Daerah di Indonesia	Website
95	Ahmad Sabila Rosyad	21-Apr-21	Program Kementerian Dalam Negeri RI dalam Mendorong Pemulihan Nasional dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Masyarakat	Website
96	Sura	22-Apr-21	Meminta Informasi No. Kartu Keluarga!	Website
97	Baries Ferryono, S.E.	22-Apr-21	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Website
98	Heri Setiyono	27-Apr-21	Permohonan Informasi SK Mutasi	Website
99	Filemon Nggorom	28-Apr-21	Pengecekan Kartu Keluarga	Website
100	Lely Sugiyati	28-Apr-21	Permohonan Aktivasi NIK	Website
101	Lismyantie	29-Apr-21	Data Pemerintah Daerah Yang Menjabat Pada Tahun 2016-2020	Website
102	Herlina Susanti	29-Apr-21	Hasil EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015-2020	Website
103	Elvita Trisnawati	30-Apr-21	Daftar Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Provinsi Jambi	Website
105	Herlina Susanti	03 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LKPD Tahun 2015-2020	Website

106	Herlina Susanti	03 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LKPD Tahun 2015-2020	Website
107	Shellenia Vitara Agatha	05 Mei 2021	Data Mengenai Alokasi Dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Untuk Level Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2009-2019	Website
108	Shellenia Vitara Agatha	05 Mei 2021	Pengajuan Surat Riset	Website
109	Ida Sri Margiati	05 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 dan 2020	Website
110	Hendy	06 Mei 2021	Permohonan Kartu Keluarga	Website
111	Ida Sri Margiati	06 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019	Website
112	Irfan Kamil	07 Mei 2021	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2020	Website
113	Herlina Susanti	07 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LKPD Tahun 2015-2020 dan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2015-2020	Website
114	Anggi Pradhita Iswahyudi	09 Mei 2021	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Website
115	Ida Sri Margiati	11 Mei 2021	Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2018	Website
116	Fifiyanti Badarudin	11 Mei 2021	Perpindahan Kependudukan	Website
117	Noverius Henutesa Nggili	18 Mei 2021	Kepmendagri Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Semua Provinsi) Tahun 2019 dan 2020	Website
118	Adi Prasetyo	18 Mei 2021	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Batu dan Jawa Timur	Website

119	Dian Nustanti Ndaomanu	19 Mei 2021	Tata Kelola Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia	Website
120	Sa'adah	26 Mei 2021	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta	Website
121	Galuna Hari Wangi	28 Mei 2021	Hasil Pemilu Legislatif Kota/ Kabupaten Tahun 2009	Website
122	Harianto Halim	28 Mei 2021	Barcode Kartu Keluarga	Website
123	Gunawan Eko Prasetyo	28 Mei 2021	Validitas NIK KTP	Website
124	Budi Waluyo	29 Mei 2021	Pencetakan KTP Online	Website
125	Ida Sri Margiati	02 Juni 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2019	Website
126	Ida Sri Margiati	02 Juni 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2019	Website
127	Ida Sri Margiati	02 Juni 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2018	Website
128	Jeska Daslita Sopaheluwakan	03 Juni 2021	Permohonan Data Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Semua Provinsi) Tahun 2019 Dan 2020	Website
129	Bravasta Ananta Hartandi	04 Juni 2021	Daftar Nama Kepala Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Se Indonesia Beserta Partai Pengusung Pada Periode Tahun 2014-2020	Website
130	Septha Lidya Purba	04 Juni 2021	Data Daerah Otonomi Yang Ada di Indonesia Sampai Dengan 2021	Website
131	Michael Anton Tantang	07 Juni 2021	Tentang E-KTP Dan No.Kartu Keluarga	Website
132	Devi Romadhona	08 Juni 2021	Kartu Keluarga	Website
133	Herlina Susanti	09 Juni 2021	Hasil EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dan Hasil EKPPD 2020 terhadap LPPD tahun 2019	Website

134	Bravasta Ananta Hartandi	09 Juni 2021	Pertanyaan Mengenai Kriteria Belanja Keperluan Mendesak Dalam PP 12/2019 Pasal 110	Website
135	Ch33ks	09 Juni 2021	Hacked by CH33KS	Website
136	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
137	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
138	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
139	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
140	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
141	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
142	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
143	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
144	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
145	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
146	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
147	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
148	Reita Ayu Azzahra	10 Juni 2021	Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat	Website
149	Lorensius Ginting	12 Juni 2021	Daftar Nama/Alamat Website Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia	Website

150	Shabrina Aliya Pramudita	14 Juni 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing	Website
151	Muhamad Rizal Yuniar	15 Juni 2021	Indeks Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Website
152	Nia Resna Frediyanti	15 Juni 2021	Pencetakan kartu keluarga	Website
153	Safaruddin	17 Juni 2021	Peta Perbatasan Aceh	Website
154	Muhlis	19 Juni 2021	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Desa Ambuau Indah TA. 2020	Website
155	Topo Widiarko	19 Juni 2021	Pertanyaan dan keluhan mengenai e-KTP	Website
156	Bella prisckilya	19 Juni 2021	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia	Website
157	Herlina Susanti	23 Juni 2021	Hasil EKPPD 2019 terhadap LPPD tahun 2018	Website
158	Risa Pawestri	24 Juni 2021	Daftar Nama Kepala Daerah Seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia Yang Menjabat Tahun 2020	Website
159	Risa Pawestri	24 Juni 2021	Realisasi APBD Per Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia Tahun 2020	Website
160	Sigit kamseno	28 Juni 2021	Surat Rekomendasi dan informasi dari kemendag RI	Website
161	Rafi Alwan Nuhan	29 Juni 2021	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020	Website
162	Bukhari	01 Juli 2021	Surat Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pemenang Pemilihan Kepala Desa Lalang Tahun 2004	Website
163	Adnan	06 Juli 2021	Permohonan Reset Akun dan Password Aplikasi PPID Kabupaten Morowali	Website

164	Yusuf Bakhtiar	06 Juli 2021	Hasil pemeringkatan penyusunan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020	Website
165	Gordianus Suwandy Fakul	09 Juli 2021	Permohonan	Website
166	Ridha Yamin	10 Juli 2021	EKPPD Tahun 2019 dan Tahun 2020	Website
167	Martin Tamaro Siburian	10 Juli 2021	Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum, Sosial periode 2012 hingga 2018 per Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Website
168	Ridhwan Adhikersa	10 Juli 2021	Indeks Kepuasan Masyarakat Per Provisnis Per tahun	Website
169	Febriyana	11 Juli 2021	Website Online Dukcapil Subang Error	Website
170	Ilhamode	14 Juli 2021	Membuat Kartu Keluarga	Website
171	Buntu Arruan B	16 Juli 2021	Nomor Akte Lelahiran	Website
172	Irvan Firdaus	16 Juli 2021	Memperbarui Kartu Tanda Penduduk	Website
173	Sirilus Bangkar	21 Juli 2021	Pengecekan NIK	Website
174	Sylvira Sadia	21 Juli 2021	Pembuatan E KTP Baru	Website
175	Masmudi	23 Juli 2021	Formulir Pindah Datang Penduduk WNI Yang Terbaru	Website
176	Masmudi	23 Juli 2021	Informasi lupa password masuk akun website ditjenpendukcapilkemendagri	Website
177	Masmudi	23 Juli 2021	Saya butuh informasi cetak kk dengan pin	Website
178	Januarita Dyah Pitaloka	26 Juli 2021	Permohonan Data Peringkat dan Status dalam EKPPD	Website
179	Herlina Susanti	29 Juli 2021	Hasil EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dan Hasil EKPPD 2020 terhadap LPPD tahun 2019	Website

180	Muhamad Lukman	29 Juli 2021	Kartu keluarga	Website
181	Romy Azmidun	29 Juli 2021	Permendagri Tentang Pengelolaan Informasi Kemendagri	Website
182	Hapid Guntara	30 Juli 2021	Cek E-KTP	Website
183	Ruben Ra Mone	31 Juli 2021	Pengumuman Seleksi PPPK	Website
184	Jouzar Farouq Ishak	01 Agustus 2021	Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014 - 2019	Website
185	Aulia Dwi Lestari	02 Agustus 2021	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun Anggaran 2017	Website
186	Aulia Dwi Lestari	02 Agustus 2021	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun Anggaran 2019	Website
187	Aulia Dwi Lestari	02 Agustus 2021	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun Anggaran 2019	Website
188	Jouzar Farouq Ishak	02 Agustus 2021	Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014 - 2019	Website
189	Lukman Hakim	03 Agustus 2021	izin pengecekan NIK dan No KK	Website
190	Muhammad Asroful Arif	04 Agustus 2021	Permohonan Cetak Kartu Keluarga	Website
191	Handhy Kusuma	05 Agustus 2021	SE Mendagri Nomor 981/1010/SJ tahun 2019	Website
192	Muhlis	08 Agustus 2021	Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Baubau	Website

193	Yusuf Bakhtiar	09 Agustus 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2021	Website
194	Yadi priyadi	11 Agustus 2021	Perda penjabaran APBD Kabupaten Garut Tahun 2021	Website
195	Siti Dara Mailia	13 Agustus 2021	Mencetak Akte Lahir	Website
196	Wahyudi	13 Agustus 2021	Cek KK	Website
197	Wahyudi	13 Agustus 2021	Cek KK	Website
198	Ulfathul	16 Agustus 2021	Pasrtisipasi Politik Kabupaten dan Kota di Indonesia	Website
199	Herlina Susanti	16 Agustus 2021	Kepmendagri terhadap LPPD tahun 2018	Website
200	Herlina Susanti	16 Agustus 2021	Kepmendagri terhadap LPPD tahun 2018	Website
201	Bayu Azan Tomi	17 Agustus 2021	MOU	Website
202	Abd. Rafik	17 Agustus 2021	Kartu Keluarga	Website
203	Anindyo Aji Susanto	19 Agustus 2021	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Indonesia Periode 2018-sekarang	Website
204	Angga Budi Hartono	20 Agustus 2021	Data Jumlah Penduduk Dan Rumah Tangga Per Kabupaten/ Kota di Indonesia	Website
205	Pepi Permadi	23 Agustus 2021	Rekapitulasi OPD per Kabupaten	Website
206	Sudiman	23 Agustus 2021	Pengaktifan No KK dan KTP	Website
207	Andri	25 Agustus 2021	Perbaikan data kependudukan E-KTP yg valid atau tidak	Website
208	Andri	25 Agustus 2021	E-KTP	Website
209	Irfan Kurniawan	26 Agustus 2021	Permohonan mencetak kartu keluarga	Website

210	Yohanes Jumi	27 Agustus 2021	Cek NIK	Website
211	Yohanes Jumi	27 Agustus 2021	Cek NIK	Website
212	Zulkarnain	28 Agustus 2021	NIK bermasalah	Website
213	Avina Setya Nastity	28 Agustus 2021	Data balita stunting di Pekanbaru	Website
214	Ida Sri Margiati	31 Agustus 2021	Hasil EKKPD terhadap LPPD tahun anggaran 2019	Website
215	Kun Haribowo	31 Agustus 2021	Data Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung per kabupaten kota seluruh Indonesia (data per kabupaten kota) tahun 2012 - 2020	Website
216	Lokasita Primadona Ginting	02-Sep-21	Informasi NIK dan Nama KTP	Website
217	Ida Sri Margiati	03-Sep-21	Hasil EKKPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2016	Website
218	Neng Siti Rahayu	03-Sep-21	Permohonan Informasi NIK	Website
219	Ivana Ardelia Rhomandhonna	04-Sep-21	Keputusan Menteri Dalam Negeri	Website
220	Admin Kabupaten Bantaeng	06-Sep-21	Fitur Menu Laporan Kepuasan Terhadap Pelayanan Informasi Publik Pada Website PPID	Website
221	Ida Sri Margiati	07-Sep-21	Hasil EKKPD terhadap LPPD Tahun Anggaran 2019	Website
222	Ida Sri Margiati	07-Sep-21	Hasil EKKPD Terhadap LPPD Tahun Anggaran 2018	Website
223	Diyah Fitriana	09-Sep-21	permohonan kartu keluarga	Website
224	Asep Hermawan	09-Sep-21	Permohonan Data Penduduk Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	Website

225	Yoga Pratama	10-Sep-21	Peraturan/Surat Edaran/ Keputusan terkait Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai Inspektorat Kabupaten	Website
226	Dewi Armita Sari	11-Sep-21	Cek NIK dan No KK	Website
227	Sutarno	12-Sep-21	Cara Online Mengurus Surat Pindah Tempat Tinggal Antar Kabupaten/Kota	Website
228	Miranti	12-Sep-21	Permohonan Aktifasi	Website
229	Tamrunah	15-Sep-21	Nomer Kartu Keluarga	Website
230	Rio Sumalauda	15-Sep-21	Profil Kepala Daerah Hasil Pemilukada 2010, 2011, dan 2012	Website
231	Nurdin	16-Sep-21	Program Pembangunan Daerah Meliputi Pembangunan Dunia Pendidikan (Ruang Kelas Baru Dan Rehab Atau Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Dimadrasah)	Website
232	Edi Apani	17-Sep-21	Kartu Keluarga	Website
233	Joko Prasetyo	17-Sep-21	Update	Website
234	Syaroni Ahmadi	18-Sep-21	Nomor KK	Website
235	Syaroni Ahmadi	18-Sep-21	Nomor KK	Website
236	Syaroni Ahmadi	18-Sep-21	Nomor KK	Website
237	Teguh Husadani	18-Sep-21	Daftar Nama-Nama Kecamatan Seluruh Indonesia Terbaru 2021	Website
238	Jhonnier Intersan Sanwarisman Turnip	20-Sep-21	Dana Desa	Website
239	Dwi Putri Larasati	20-Sep-21	Permohonan Daftar Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah 2015-2020	Website
240	Jhonnier Intersan Sanwarisman Turnip	20-Sep-21	Penggunaan dana desa	Website

241	Ahmad	21-Sep-21	permohonan informasi salinan hasil review terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2021	Website
242	wawan sugiyarto	21-Sep-21	Kartu keluarga	Website
243	Dudi Solehudin	21-Sep-21	Untuk mencetak Kartu Keluarga	Website
244	Dudi Solehudin	21-Sep-21	Untuk mencetak Kartu Keluarga	Website
245	Marsimin	21-Sep-21	Untuk mencetak Kartu Keluarga	Website
246	Ni Wayan Febrianti Risma Dewi	22-Sep-21	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional	Website
247	Rohman	22-Sep-21	Perbedaan NIK di E-ktp dn KK	Website
248	Shella Mesista Agrefina	22-Sep-21	Kartu Keluarga	Website
249	M. Fathi Khairan	22-Sep-21	Pengaman wilayah pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK)	Website
250	Arif Hidayat	23-Sep-21	Pembaharuan Data KTP	Website
251	Zaenal Muttaqin	24-Sep-21	Data Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama Tahun 2017-2020 Per Provinsi	Website
252	Siti Kotimah	24-Sep-21	Permohonan Cetak Ulang Kartu Keluarga No 1602210904120008	Website
253	Siti Kotimah	24-Sep-21	Permohonan Cetak Ulang Kartu Keluarga No 1602210904120008	Website
254	Gracia Sekarjati Vimala Sukma Rahajeng	26-Sep-21	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Website
255	Desiderius Viqi	28-Sep-21	Permintaan Ahli	Website
256	Akhmad Kamaluddin	30-Sep-21	Data Realisasi Perdagangan Antar Pulau Minyak Kelapa Sawit (CPO) Dan Produk Turunanya Tahun 2016-2020	Website

257	Gracia Sekarjati Vimala Sukma Rahajeng	02 Oktober 2021	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahh Daerah (LPPD)	Website
258	Muhammad Anjas Asyari	04 Oktober 2021	Update Terbaru Daftar Kabupaten, Kota, Kecamatan, Keluraha, Desa, Distrik Tahun 2021	Website
259	Fathul Huda Yusuf Ukhrowi	04 Oktober 2021	Surat Edaran Nomor 981/4092/ KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Website
260	Yovita Gosali	04 Oktober 2021	Membuat KK baru	Website
261	Anggun Nadia	07 Oktober 2021	Permohonan Bantuan Data tentang Aparatur Desa	Website
262	Muhammad Mahdi	07 Oktober 2021	Permohonan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Baru	Website
263	Muhammad Mahdi	07 Oktober 2021	Permohonan Pencetakan Kartu Keluarga	Website
264	Wamustofa Hamzah, SH	07 Oktober 2021	Surat Persetujuan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerin- tah Kota Balikpapan	Website
265	Syifa Madina Sholeh	08 Oktober 2021	Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan	Website
266	Iban Sujana	08 Oktober 2021	Penahanan Ijasah	Website
267	Muhammad Iqbal	08 Oktober 2021	Permohonan Data SP4N- LAPOR dan Permohonan Wawancara dengan pihak Pengelola LAPOR!	Website
268	Imam Masrukhi	09 Oktober 2021	Pengelolaan Keuangan Desa	Website
269	Muh Mudhofier	09 Oktober 2021	Kapan Semua Layanan Dukcapil Bisa Online	Website
270	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Akte Kelahiran	Website

271	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Akte Kelahiran	Website
272	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Akte Kelahiran	Website
273	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Akte Kelahiran	Website
274	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Akte Kelahiran	Website
275	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Kk Baru	Website
276	Alin Sundari	10 Oktober 2021	Pembuatan Kk Baru	Website
277	Sahandri Akbar Ar Bella	10 Oktober 2021	Validasi NIK	Website
278	Rini	10 Oktober 2021	Akta Kematian	Website
279	Rini	10 Oktober 2021	Akta Kematian	Website
280	Tan Chia Hwie	10 Oktober 2021	Kartu Keluarga	Website
281	Suryana Sulaeman	13 Oktober 2021	Permohonan Cetak Kartu Keluarga	Website
282	Suryana Sulaeman	13 Oktober 2021	Permohonan Cetak Kartu Keluarga	Website
283	Meliana Dewi Handoko	13 Oktober 2021	Kartu Keluarga	Website
284	Rahmad Hakiki	17 Oktober 2021	Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pindah Domisili	Website
285	Rahmad Hakiki	17 Oktober 2021	Kartu Keluarga	Website
286	Rahmad Hakiki	17 Oktober 2021	Kartu Keluarga	Website
287	Rahmad Hakiki	17 Oktober 2021	Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Pindah Domisili	Website
288	Haris Febriansyah R	17 Oktober 2021	Aktivasi KK Online	Website
289	Mellyni Rosdi	18 Oktober 2021	Alokasi dan realisasi dana otonomi khusus provinsi aceh per kabupaten/kota 2010-2014	Website
290	Mellyni Rosdi	18 Oktober 2021	Alokasi dan realisasi dana otonomi khusus provinsi aceh per kabupaten/kota 2010-2014	Website
291	Mellyni Rosdi	18 Oktober 2021	Alokasi dan realisasi dana otonomi khusus provinsi aceh per kabupaten/kota 2010-2014	Website

292	Adama	18 Oktober 2021	Update data kependudukan	Website
293	Thareq Akmal Hibatullah	18 Oktober 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 beserta lampiran	Website
294	Thareq Akmal Hibatullah	18 Oktober 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 beserta lampiran	Website
295	Thareq Akmal Hibatullah	18 Oktober 2021	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 Beserta Lampiran	Website
296	Gracia Sekarjati Vimala Sukma Rahajeng	20 Oktober 2021	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Provinsi Jawa Barat TA 2015 - 2019	Website
297	Mutoharoh Munirotn	23 Oktober 2021	Cetak Akta Lahir	Website
298	Asep Hasan Basri	23 Oktober 2021	Penambahan Anggota Kartu Keluarga	Website
299	Mellyni Rosdi	25 Oktober 2021	Alokasi dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh perkabupaten/Kota 2010-2014	Website
300	Mad Muadin	26 Oktober 2021	Perubahan Data	Website
301	Mad Muadin	26 Oktober 2021	Perubahan Data	Website
302	Rida Maulana	27 Oktober 2021	Pengajuan Cetak Kartu Keluarga	Website
303	Anggun Nadia	27 Oktober 2021	Permohonan Bantuan Data	Website
304	Nurida	29 Oktober 2021	Penambahan Data Anak Di Kartu Keluarga	Website
305	Ahmad Hadi	01-Nov-21	Pembuatan KK Baru	Website
306	Erika Naomi	02-Nov-21	Pembuatan Kartu Keluarga	Website
307	Erika Naomi	02-Nov-21	Pembuatan Kartu Keluarga	Website
308	Wisgianto	03-Nov-21	Update KK	Website
309	Wisgianto	03-Nov-21	Sy Mohon Agar No KK dan NIK Saya di Update	Website
310	Erna Ika Puspita Sari	03-Nov-21	Informasi mutasi an. Erna Ika Puspitasari, S.Pt	Website

311	Muhammad Anjas Asyari	04-Nov-21	Update Terbaru Daftar Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Distrik Tahun 2021	Website
312	Septian Hokiarto	05-Nov-21	Pisah KK	Website
313	Nur Shabrina	05-Nov-21	Pembuatan KK Online	Website
314	Dany Wahyu Endro Susilo	05 November 2021	Kartu Keluarga	Website
315	I Wayan Suka Wirawan	06-Nov-21	Salinan Dokumen Kependudukan	Website
316	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
317	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
318	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
319	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
320	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
321	Thareq Akmal Hibatullah	10-Nov-21	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95	Website
322	Alya Azzahra	11-Nov-21	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 dan 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan 2020	Website
323	Nurul Dwi Hudatullah	12-Nov-21	Kartu Keluarga Baru	Website
324	Erna	12-Nov-21	Permohonan Cetak Ulang Akta Lahir Anak	Website
325	Hendra Friana	15-Nov-21	Cek Nomer KK	Website
326	Hendra Friana	15-Nov-21	Kartu Keluarga	Website

327	M. Adam Malik	15-Nov-21	Surat Perintah Pembayaran Dinas	Website
328	Arman Haqqi Anna Zili	16-Nov-21	Kartu Keluarga	Website
329	Septi Evalina Purba	17-Nov-21	Surat Pembuatan Kartu Keluarga Baru	Website
330	Yongker Pelupessy	19-Nov-21	Pengurusan Kartu Keluarga Elektronik, KTP Elektronik, Akta Kelahiran Istri dan Anak	Website
331	Yongker Pelupessy	19-Nov-21	Pengurusan Kartu Keluarga Elektronik, KTP Elektronik	Website
332	Iwan Fals	19-Nov-21	SKPWNI	Website
333	Iwan Fals	19-Nov-21	SKPWNI	Website
334	Fitri apriyani	20-Nov-21	Penerbitan Kartu Keluarga	Website
335	Idrus Usman	20-Nov-21	Cara Cek No Kartu Keluarga	Website
336	Alan	20-Nov-21	Permohonan Kartu Keluarga	Website
337	Budi Setiawan	21-Nov-21	Permohonan Sinkronisasi Data Pusat Untuk Kartu Keluarga	Website
338	Romi Santika Pratama	23-Nov-21	Pembuatan Akta Lahir	Website
339	Andreas Onward Kredo Parhusip	23-Nov-21	Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 161.81-4052 Tahun 2019	Website
340	Sulistyo Nugroho	23-Nov-21	Pengurusan Akta Lahir Hilang Namun Sudah Pindah Domisili	Website
341	Aris Jainuri	24-Nov-21	SK Penetapan Mutasi a.n. Aris Jainuri	Website
342	Adera Demogra	26-Nov-21	Nomor Kartu Keluarga	Website
343	Nike purwanti	26-Nov-21	Data NIK 1709052811910001	Website

344	Esti Novia Maharani	29-Nov-21	Softcopy Laporan EKPPD Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia TA 2016-2020	Website
345	Anis Marsela	03 Desember 2021	Pembuatan Kartu Keluarga	Website
346	Amin Romdhon	03 Desember 2021	Akta Kwlahiran	Website
347	Tedy Septian	07 Desember 2021	Permohonan Permintaan Data Jumlah Penduduk Beserta Luas Wilayah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Selama Tahun 2010 Sd 2020	Website
348	Irma Denny Rizkyanto	07 Desember 2021	Informasi SK Mutasi	Website
349	Abas	07 Desember 2021	Kartu Keluarga	Website
350	Joni	11 Desember 2021	Permohonan Informasi Prosedur Pengelolaan Anggaran Dana Desa	Website
351	Rahmad Hamzah	11 Desember 2021	Nilai LPPD Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo	Website
352	Gopal Frandika	13 Desember 2021	Ingein Mengetahui Wajah Orang Tua Saya	Website
353	Prima Ardiyansa	13 Desember 2021	Kartu keluarga	Website
354	Dodi Heryadi	14 Desember 2021	Mencetak Akta Lahir Orang Tua	Website
355	Irma Denny Rizkyanto	14 Desember 2021	Meminta Dokumen SK Mutasi	Website
356	Meutya Rahmah Dini	14 Desember 2021	TPID	Website
357	Irma Denny Rizkyanto	14 Desember 2021	Meminta Dokumen SK Mutasi	Website
358	Rudni	14 Desember 2021	Pencetakan Kartu Keluarga Online	Website

359	Zudi Kurniawan	14 Desember 2021	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunungkidul tahun 2016-2020	Website
360	Budi Yanto	15 Desember 2021	SKP3302020317	Website
361	Afiv Achmad Sulthoni	15 Desember 2021	Akta Kelahiran Anak	Website
362	Eko Sugiyanto	15 Desember 2021	Data KK	Website
363	Nurrahmaniah	17 Desember 2021	Informasi Mutasi	Website
364	Silverius Bangun	19 Desember 2021	Permohonan Informasi Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabu...	Website
365	Sandi	20 Desember 2021	KTP Elektronik Katanya Tidak Terdaftar	Website
366	Rifaldi Arbianto Nugroho	20 Desember 2021	Permohonan Pembuatan KK Baru	Website
367	Tedy Septian	23 Desember 2021	Permohonan Permintaan Data Kepadatan Penduduk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selama tahun 2008 sd 2020	Website
368	Nurrahmaniah	23 Desember 2021	Permohonan Rekom Baru	Website
369	Arga Seftiyan Wijaya	23 Desember 2021	Kartu Keluarga Hilang	Website
370	Arga Seftiyan Wijaya	23 Desember 2021	Kartu Keluarga Hilang	Website
371	Misjan Nurbudiman	26 Desember 2021	Akte Kelahiran	Website
372	Alifah Laily Kurniati	27 Desember 2021	Status Validitas NIK	Website
373	Priambodo Rokhmat Pratama	27 Desember 2021	Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2018-2019	Website
374	Nina Indriyanti	27 Desember 2021	Kartu Keluarga	Website
375	Deny Ahmad Pratama	28 Desember 2021	Cetak Kartu Keluarga	Website
376	Puji Purwati	28 Desember 2021	Surat Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembinaan Organisasi ASPPA dan Audiensi	Website

377	Eddy Susilo	28 Desember 2021	Kartu Keluarga	Website
378	Poppy A Tasiam	28 Desember 2021	Cetak Ulang Kartu Keluarga	Website
379	Ifan Davani	29 Desember 2021	Jumlah Penduduk Islam Menurut Provinsi, Tahun 2012-2020	Website

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri melalui **mail.kemendagri.go.id** selama Tahun 2021:



No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Informasi Yang Dimohon	Cara Mengakses Informasi
1	Panitia Deklarasi Pendirian BLPM Satu Priok	07 Januari 2021	Salinan surat izin persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang tentang mutasi jabatan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara enam bulan sebelum pilkada tahun 2020	Email
2	Rizka Fitriyani	08 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Penanganan Kesehatan di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia 2. Anggaran Jaring Pengaman Sosial di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia 3. Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia 	Email
3	PPID Kabupaten Karanganyar	20 Januari 2021	LLID Kabupaten Karanganyar Tahun 2020	Email
4	Gita Safitri	29 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri (600/KWT/SOSPOL/D2/VIII/1977); 2. Dokumen Peresmian Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) oleh Kemendagri tanggal 31 Desember 1977; 3. Dokumen tentang Program Peningkatan Peranan RT/ RW dalam Proses Pembauran, diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri tahun 1982; 4. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477 Tahun 1978; 5. Dokumen Pedoman Pembauran Bangsa yang diterbitkan oleh Dirjen SOSPOL tahun 1993 	Email

5	PPID Jawa Tengah	11 Februari 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Jateng Tahun 2020	Email
6	PPID Kota Serang	17 Februari 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Kota Serang Tahun 2020	Email
7	PPID Kabupaten Kepulauan Anambas	18 Februari 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015-2019	Email
8	Benedick Febrian Fernando Satriadi	19 Februari 2021	Ingin Mengajukan Pertanyaan Mengenai Lowongan Magang di Kementerian Dalam Negeri	Email
9	Romlan Bangka	24 Februari 2021	Linknya Tidak Bisa Dibuka	Email
10	Nurul Ainun	25 Februari 2021	Registered	Email
11	Waode Arni Tamara	09 Maret 2021	Kenapa Email Yang Saya Regetrasi, Tidak Bisa di Verifikasi	Email
12	PPID Provinsi Sulawesi Tengah	26 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	Email
13	PPID Provinsi Bali	26 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Bali Tahun 2020	Email
14	PPID Provinsi Sulawesi Tenggara	26 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020	Email
15	PPID Provinsi DKI Jakarta	29 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	Email
16	PPID Provinsi Jambi	30 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Jambi Tahun 2020	Email
17	PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	Email
18	PPID Kabupaten Deli Serdang	31 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020	Email
19	PPID Provinsi DI Yogyakarta	31 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020	Email

20	PPID Provinsi Kepulauan Riau	06 April 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Email
21	Nisan Saputra	06 April 2021	Mohon agar Bagian Humas Pemkab Bekasi dan Bagian Prokopim berkenan membaca Surat Elektronik yang sudah saya kirimkan pada Tanggal 30 Maret dan 31 Maret 2021, melalui kedua alamat e-mailnya yaitu humas.bekasikab@gmail.com dan prokopim.bekasikab@gmail.com	Email
22	PPID Provinsi Sulawesi Selatan	09 April 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	Email
23	Hendrayani Yani	09 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir hukum pasal 26 ayat (4) Huruf e UU Desa No. 6 tahun 2014, yang berbunyi: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan Demokrasi dan Berkeadilan Gender; 2. Apakah dikarang Seorang Perempuan menjadi Ketua RT? 3. kemana melaporkannya seorang perempuan yang sudah terpilih jadi ketua RT di tolak dengan alasan Perempuan oleh Pengurus RT dan Tokoh Masyarakat bahkan Kepala Desa dan BPD 	Email
24	Roby Tutuarim	16 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan kepengurusan tingkat pusat lembaga adat apakah di Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Provinsi, sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pendaftaran Lembaga Adat; 2. Anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan informasi publik terkait PPID Kemendagri 	Email

25	Su Tirto	21 April 2021	Kenapa provinsi dan kabupaten di aplikasi PPID tidak bisa di klik	Email
26	PPID Provinsi Kalimantan Utara	23 April 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	Email
27	PPID Kota Banjarbaru	26 April 2021	Laporan Tahunan PPID Utama Kota Banjarbaru Tahun 2020	Email
28	PPID Provinsi Sulawesi Selatan	26 April 2021	Revisi Laporan Anggaran PPID Prov. Sulsel Tahun 2020	Email
29	Nisan Saputra	28 April 2021	Sampaikan Tentang Laporan Saya Terkait AJB yang belum ada Formulir SSP Untuk PPH Final dan SSPD Untuk Pajak BPHTB Yang AjbNya dari Kantor Kecamatan Sukakarya, Sudah ditindaklanjuti dan sudah mendapatkan informasi terkait No HP atau pihak Kecamatan Sukakarya	Email
30	Hendrayani Yani	02 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Masyarakat Desa sangatlah awam dengan yg namanya Peraturan Desa, dari mulai Peraturan Desa tentang RPJMDes, Peraturan Desa Rencana Pembangunan Desa, sampai Peraturan Desa tentang APBDDes, masyarakat tidak tau membedakan atau mencirikan tentang 'keabsahan' dari Peraturan Desa, yang menjadi pertanyaan? Bagaimana ciri-ciri keabsahan Peraturan Desa dan yang cacat hukum? 2. 2. Jika peraturan yg cacat hukum yang di dalamnya berisi anggaran, semisal Perdes RPJMDes, RKPDes, APBDDes, apakah bisa di jalankan? Lantas bagaimana keabsahan penggunaan anggarannya? Terus siapa yg bertanggung jawab keabsahan penggunaan anggarannya? 	Email

			3. Jika masyarakat sudah mengetahui bahwa penggunaan anggaran dari Perdes-Perdes yg cacat hukum, kemana masyarakat mengadukannya untuk membatalkannya dan meminta pertanggungjawabannya?	
31	Hendrayani Yani	03 Mei 2021	Substansi yang ditanyakan mengapa Pemda Kabupaten serang tidak memerintahkan Pembentukan PPID di setiap Pemerintah Des sesuai perintah Perki No.1 Tahun 2018	Email
32	Lismayantie Salahuddin	04 Mei 2021	Data Pemerintah Daerah di Indonesia pada Periode 2016-2020 yang Terindikasi Mengalami Politik Dinasti	Email
33	Shellenia Vitara Agatha	05 Mei 2021	Pengajuan Surat Riset Mengenai Data Realisasi Otonomi Khusus ditujukan Sekretaris Jenderal atau Ditjen Bina Keuangan Daerah	Email
34	Shellenia Vitara Agatha	10 Mei 2021	Alokasi dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2009 hingga 2019	Email
35	Hendrayani Yani	14 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh masyarakat definitifnya apa? 2. yang dimaksud keterwakilan di ayat (3) huruf a s/d j itu orangnya siapa saja, apakah harus ada SK dari Kades, agar keterwakilannya dikatakan Sah? 3. Apakah seluruh Ketua Kelembagaan Desa harus di Undang dalam Musdes? 4. Apakah undur Pemerintah Desa dan BPD wajib hadir semua? 5. Jika masyarakat diluar Musdes mendapatkan salinan Berita Acara Musdes dari hasil meminta informasi publik melalui PPID kabupaten yang hadir tidak memenuhi quorum sesuai dari petunjuk Pertanyaan Dari No.1 s/d 4, Bagaimana Cara Masyarakat Menggugat Hasil Musdes tersebut? 	Email

36	Shellenia Vitara Agatha	17 Mei 2021	Persyaratan apa saja yang harus saya kirimkan melalui pos untuk meminta informasi untuk bahan penyusunan skripsi selain surat pengantar dari kampus	Email
37	Dika Channel	19 Mei 2021	Izin permohonan pendaftaran mohon petunjuk	Email
38	Hendrayani Yani	12 Juni 2021	Salinan surat Ditjen kemendagri Nomor :188.32/7444/BPD Tanggal 25 oktober 2019	Email
39	Shabrina Dita	14 Juni 2021	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008, berikut pertanyaan yang perlu dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ketentuan pelaporan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri di atas masih berlaku? Apakah yayasan (sebagai salah satu bentuk organisasi masyarakat) harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dalam menerima donasi dari pihak asing? 2. Kapan saja frekuensi yayasan harus melaporkan dan meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam menerima donasi dari pihak asing? Apakah per bulan/tahun/ setiap mendapatkan donasi? 3. Apakah sanksinya apabila yayasan tidak melakukan kegiatan pelaporan dan tidak menerima persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal menerima donasi dari pihak asing? 4. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008, penerimaan bantuan pihak asing harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media publik. Apakah ketentuan ini masih berlaku? 	Email

40	Ridha Akbar	16 Juni 2021	Mau Liat Daftar Kependudukan Catatan Sipil	Email
41	Cahyo sejati	17 Juni 2021	Maaf pesan spam kurangjelas	Email
42	Rianita Sujarwati	22 Juni 2021	Data Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah Atau Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Indonesia Setiap Tahun	Email
43	Risa Pawestri	28 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang dibutuhkan: Realisasi APBD TA 2019 dan 2020 Per Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia (sebagaimana terlampir dalam surat); 2. Tujuan penggunaan informasi: penyusunan skripsi, dan hasil riset yang telah disusun dalam semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademis 	Email
44	Devi Romadhona	08 Juni 2021	Ingin Bertanya Mengenai Akun Yang Saya Daftarkan Dengan Email Ini, Karena Saya Lupa Username Dan Passwordnya	Email
45	Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)	07 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Keputusan (SK) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tahun 2021; 2. Salinan surat persetujuan Kementerian Dalam Negeri tentang mutasi jabatan dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara enam bulan sesudah pilkada 2020; 3. Bilamana terjadi mutasi jabatan enam bulan sesudah Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tanpa ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Sanksi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan ketentuan peraturan yang berlaku 	Email

46	Safaruddin	08 Juli 2021	Peta Perbatasan Aceh merujuk pada 01 Juli 1956 sebagaimana disebutkan dalam angka 1.1.4 MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative (Martii Ahtisaari) pada tanggal 15 Agustus 2005	Email
47	Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI)	26 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Keputusan (SK) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tahun 2021; 2. Salinan surat persetujuan Kementerian Dalam Negeri tentang mutasi jabatan dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara enam bulan sesudah pilkada 2020; <p>Bilamana terjadi mutasi jabatan enam bulan sesudah Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tanpa ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Sanksi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan ketentuan peraturan yang berlaku</p>	Email
48	Agus Office Chanel	29 Juli 2021	Link untuk aktivisasi akun email tidak bisa	Email
49	Rizka Fitriyani	04 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 per 31 Juli 2021 di 542 Pemerintahan Daerah; 2. Data Realisasi APBD per 31 Juli 2021 di 542 Pemerintahan Daerah. 	Email
50	Heri Yandi	12 Agustus 2021	3. Kenapa Saya Tidak Bisa Aktivasi Email	Email
51	Toha Rafael	21 Agustus 2021	4. Maaf Kok Tidak Bisa di Aktivasi Ya	Email

52	Habib Mahmud Al Habsy	24 Agustus 2021	Cara Gak Bisa Aktivasi	Email
53	Andrydikdik Bantaeng	25 Agustus 2021	Tidak Bisa di Aktivasi	Email
54	Faiz Ais	25 Agustus 2021	Verifikasi	Email
55	Rudi Hartono Gurusinga	02 September 2021	Terimakasih atas responnya	Email
56	Idna Hadi	02 September 2021	Laporan Keuangan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2015-2019 Karena Saya Tidak Menemukan Data Tersebut Dihalaman Website	Email
57	Elshaday Pelita Kasih	08 September 2021	Telah Melakukan Pendaftaran Sebagai Pemohon Informasi Di PPID. Saat Ini Akun Anda Belum Dapat Digunakan Untuk Mengajukan Permohonan	Email
58	Mohamad sardion Sardion	12 september 2021	Telah Melakukan Pendaftaran Sebagai Pemohon Informasi Di PPID. Saat Ini Akun Anda Belum Dapat Digunakan Untuk Mengajukan Permohonan	Email
59	Mang Iya	12 September 2021	Telah Melakukan Pendaftaran Sebagai Pemohon Informasi Di PPID. Saat Ini Akun Anda Belum Dapat Digunakan Untuk Mengajukan Permohonan	Email
60	Yoga Pratama	13 September 2021	Perkenalkan Saya Yoga Pegawai Dari Inspektorat Kabupaten Jombang, Maaf Saya Mau Tanya Permohonan Informasi Saya Belum Di Tanggapi Sejak Kemarin. Mohon Bantuannya Segera Di Tanggapi Dan Atas Perhatian Admin Saya Ucapkan Terima Kasih	Email
61	Dar Sono	14 September 2021	Telah Melakukan Pendaftaran Sebagai Pemohon Informasi Di PPID. Saat Ini Akun Anda Belum Dapat Digunakan Untuk Mengajukan Permohonan	Email

62	Ike Elmasari	16 September 2021	Mohon Ijin berikut disampaikan tembusan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi ASN a.n sebagai berikut: Nama : Ike Elmasari, ST NIP : 1982062011012009 Fisik surat akan dikirimkan tersendiri melalui kurir. Mohon dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih	Email
63	Google Google	21 September 2021	Kenapa Untuk Verifikasi Akun Blum Bisa	Email
64	Google Google	21 September 2021	Akun Saya Tidak Dapat Masuk	Email
65	Adee Mr	23 September 2021	kok gak bisa di klik ya	Email
66	Ansori Progresif Jaya	26 September 2021	Mengapa tidak bisa aktivasi	Email
67	JARI Indonesia	27 September 2021	Mengkonfirmasi Jadwal Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 009/V/KIP-PS-A/2020, Tanggal 23 Maret 2021 Yang Memerintahkan Termohon (Kementerian Dalam Negeri) Untuk Memberikan Informasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Paragraf (2.2) Kepada Pemohon Dengan Cara Memperlihatkan Dan Memberikan Kesempatan Mengetahui Dokumen Tanpa Perekaman Atas Dokumen	Email
68	Aldy Ismail	28 September 2021	Apakah masyarakat boleh membantu dalam pencetakan e-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dsb?	Email
69	Ansori Progresif Jaya	28 September 2021	kenapa daftar masih tidak bisa	Email
70	Wisyanto 26	28 September 2021	Kenapa tidak bisa aktipasi dari email padahal sudah dapat emailnya dah suruh menekan aktipasi tpi ko ga kebuka buka	Email

71	Faisal 47	05 Oktober 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
72	Mas Doy	13 Oktober 2021	Tidak bisa di aktifkan akun nya	Email
73	Cinta Barra	19 Oktober 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
74	Lastagnes Permatasari	22 Oktober 2021	Kenapa tidak bisa di klik	Email
75	Tri Lestari	24 Oktober 2021	Tdk Bisa Membuka	Email
76	Bily Alfiano	26 Oktober 2021	Bagaimana Cara Membuat KK Online	Email
77	Jumrah	27 Oktober 2021	Saya Tidak Bisa Meng Aktivasi Akun Selalu Muncul 403	Email
78	Dyah Arum Kusumawardani	28 Oktober 2021	Informasi Saat Di Klik Kolom Hijau Tidak Dapat Kami Lakukan, Kemudian Kami Copy Paste Link Yang Telah Dikirimkan Ke Dalam Web Browser Dikatakan Akun Aktif Namun Bila Kami Kembali Ke Halaman Playstore Tertulis Akun Belum Aktif	Email
79	Salwanik matul qodri 2005	02 November 2021	Daftar program no NIK 3522243012750001	Email
80	Dien Rosidin	02 November 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
81	Hesti Adiyanti	08 November 2021	Ingin mendaftarkan NIK anak saya gimana biar jadi online biar dapat aktivasinya juga	Email
82	Muhammad Amrang	16 November 2021	Tidak bisa di klik	Email
83	Andreas Sinaga	16 November 2021	Mohon Dukungannya Untuk Me-Reset Username Dan	Email
85	Iwan Fals	23 November 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email

86	Sukoco Marzuky	25 November 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
87	Saradodo Laia	27 November 2021	Kok tidak bisa klik aktivasi untuk login yah	Email
88	Khom974	06 Desember 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
89	Aliza 02	13 Desember 2021	Tidak Bisa di Klik	Email
90	Gistha Nafisha	15 Desember 2021	Tidak Bisa di Click	Email
91	Nadia Vega	16 Desember 2021	Link dan ULRnya tidak berfungsi	Email
92	Sudarman	17 Desember 2021	Cara Cetak KK Online	Email
93	Agunk Seftiyan	20 Desember 2021	Tidak bisa di aktivasi	Email
94	Agunk Seftiyan	20 Desember 2021	Tidak bisa di aktivasi	Email
95	Ayu Sartika	21 Desember 2021	Saat ini akun Anda belum dapat digunakan untuk mengajukan permohonan	Email
96	Agunk Seftiyan	23 Desember 2021	Tidak bisa mengklik aktivasi	Email
97	The Maanyan Boy	29 Desember 2021	sengketa Pilkades PAW Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur tidak menemukan keputusan yang adil, transparan dan berdasarkan aturan ketentuan perundangan	Email
98	Josye Alivia	30 Desember 2021	informasi lowongan kerja sebagai Technical Support pada Pengelolaan Pengaduan Kementerian Dalam Negeri, maka dengan ini saya ingin menunjukkan ketertarikan saya terhadap lowongan kerja ini dan ingin melamar pekerjaan untuk posisi tersebut	Email



Rekapitulasi pelayanan informasi publik melalui kanal resmi PPID Kemendagri Tahun 2021

2021

Jumlah Permohonan melalui
ppid.kemendagri.go.id

Jumlah Permohonan melalui
ppid@kemendagri.go.id

Januari

28

4

Februari

13

6

Maret

30

9

April

32

10

Mei

20

8

Juni

37

7

Juli

22

4

Agustus

32

6

September

41

16

Oktober

49

8

November

40

9

Desember

35

11

Total

379

98



3.2

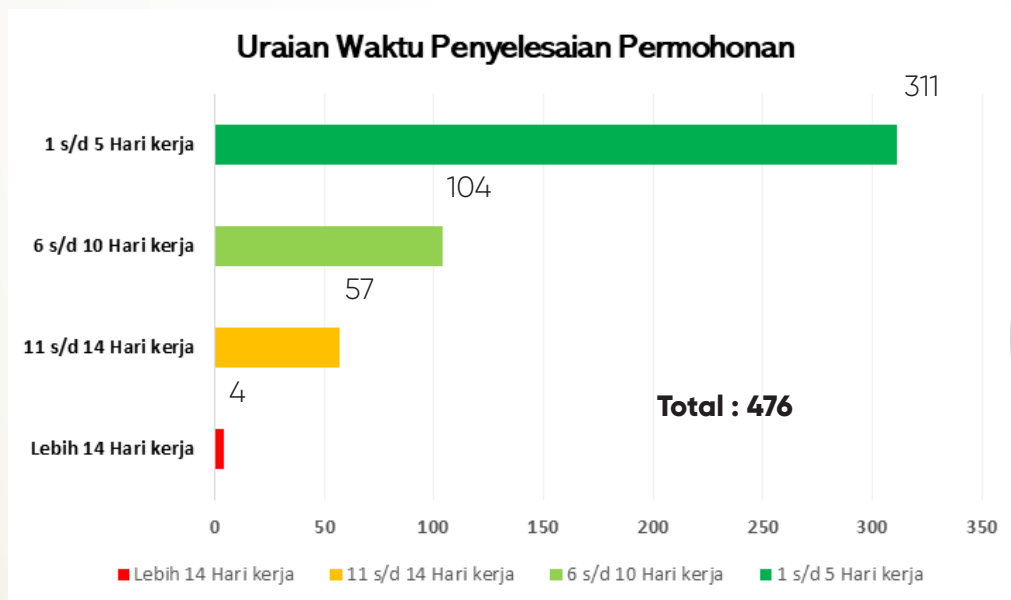
Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Berpedoman pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:



1. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;
2. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;
4. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya Petugas informasi memproses dan memenuhi permintaan Pemohon. Adapun waktu yang dibutuhkan oleh Petugas dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu :



3.3

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Selama tahun 2021 tidak ada permohonan informasi yang disampaikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh permohonan informasi disampaikan secara tidak langsung melalui media aplikasi ppid.kemendagri.go.id dan email ppid@kemendagri.go.id. Berdasarkan data, jumlah permohonan informasi yang masuk adalah 476 permohonan informasi, dan sebanyak 447 permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan 12 permohonan informasi ditolak. Dari total seluruh permohonan informasi dimaksud terdapat 17 permohonan informasi yang menjadi keberatan informasi. Namun seluruh



HASIL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN OLEH KEMENDAGRI SELAMA TAHUN 2021

BULAN	JML	TINDAK LANJUT				
		SELESAI	PROSES	TOLAK	DISPOSISI	KEBERATAN
JANUARI	32	30	0	0	0	2
FEBRUARI	19	15	0	1	0	3
MARET	39	34	0	3	0	2
APRIL	42	368	0	3	0	5
MEI	28	27	0	0	0	1
JUNI	44	43	0	1	0	0
JULI	26	23	0	2	0	1
AGUSTUS	38	38	0	0	0	0
SEPTEMBER	57	55	0	0	0	2
OKTOBER	56	54	0	1	0	1
NOVEMBER	49	49	0	0	0	0
DESEMBER	46	45	0	1	0	0
TOTAL	476	447	0	12	0	17

3.4

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah menolak 12 (dua belas) Permohonan informasi. Sebagian besar alasan penolakan permohonan informasi adalah otoritas instansi lain, atau informasi yang dimohon bukan merupakan kewenangan PPID Kementerian Dalam Negeri.

**DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SELAMA TAHUN 2021**

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Informasi Yang Dimohon	Alasan Penolakan
1	Chrisma Berninda	27 Februari 2021	Perusahaan-Perusahaan Jasa Pengiriman Barang di Kota Bengkulu	Otoritas Instansi Lain
2	Singgih Setiadi	11 Maret 2021	Permohonan Data Kementerian/Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah/Lembaga Non Kementerian Paling Akuntabel	Otoritas Instansi Lain
3	Yusaf Hari Purnomo	12 Maret 2021	Sertifikat Areal Perkantoran Batu Enam (6)	Otoritas Instansi Lain
4	Muhammad Irfan	30 Maret 2021	Permohonan	Belum dikuasai
5	Avenia Febri Pradita	15 April 2021	Human Capital Index 2020	Belum dikuasai
6	Rahmanda Widyadhari	19 April 2021	Permohonan Informasi Data Bantuan Pemerintah Selama Covid-19	Belum dikuasai
7	Sukartaji	21 April 2021	Assalamualaikum	Belum dikuasai
8	Ali Mahfud	19 Juni 2021	BLT	Otoritas Instansi Lain
9	Juike Semsu Sual	19 Juli 2021	Evaporasi Air Sungai	Otoritas Instansi Lain
10	Junaidy	22 Juli 2021	Untuk Data	Belum Didokumentasikan

4 | INOVASI DAN KOLABORASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Dalam rangka meningkatkannya kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagai coordinator, Pembina dan pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik, selama tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kolaborasi dan inovasi.

1. Optimalisasi system informasi penunjang keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri
 - a. Aplikasi e perda. Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk membantu pemerintah daerah memberikan konsultasi online penyusunan produk hukum perundang-undangan. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah secara efektif dan efisien;
 - b. Simudah. Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang memberikan akses informasi publik bagi ASN pada Pemerintah Daerah yang mengajukan mutasi lintas provinsi. Sehingga ASN dapat mengetahui sejauh mana proses pengajuan mutasinya telah diproses;
 - c. Ipop. Merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi untuk memberikan informasi publik berupa data agregat kependudukan berdasarkan wilayah yang selalu

update dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan;

2. Asistensi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Daerah, selama tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Informasi melakukan asistensi pada Pemerintah Daerah yang masih belum masuk kualifikasi Informatif, yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun dengan memberikan dukungan berupa konsultasi terkait layanan informasi publik, bantuan penyediaan aplikasi ppid pada aplikasi ppid.kemendagri.go.id serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021.
3. Fasilitasi sengketa informasi secara virtual. Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan sengketa informasi yang proses persidangannya masih berlanjut sampai dengan tahun 2021. Kegiatan persidangan difasilitasi secara virtual dengan mengedepankan protocol Kesehatan. Pelaksanaan amar putusan siding juga dilaksanakan dengan mengedepankan protocol Kesehatan namun tetap memaksimalkan hak pemohon informasi untuk mendapatkan akses atas informasi yang disengketakan.
4. Penyediaan dan pengumuman informasi terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada website utama Kementerian Dalam Negeri, Website unit kerja Kementerian Dalam Negeri dan media social Kementerian Dalam Negeri.

5. Webinar keterbukaan informasi publik. Kegiatan webinar keterbukaan informasi publik dilaksanakan untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari. Materi yang disampaikan terkait klasifikasi informasi yang dikecualikan dan penyelesaian sengketa informasi.
6. Penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan untuk mengakomodir masukan dari Pemerintah Daerah terkait penguatan kelembagaan PPID pada Pemerintah Daerah, PPID Desa serta untuk menyesuaikan standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021.
7. Rapat Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang pimpinan unit kerja dan petugas pelayanan informasi publik untuk memaparkan kinerja pelayanan informasi publik masing-masing unit kerja. Kegiatan juga dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi oleh setiap unit kerja untuk menyediakan informasi publik masing-masing.
8. Bimbingan teknis peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada tanggal 1 s.d 3 September 2021. Kegiatan dilaksanakan secara luring bagi seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Anie Londa, Tya Tirtasari dan pakar komunikasi Wicaksono serta bimbingan teknis aplikasi PPID Kemendagri.
9. Rapat Koordinasi PPID pada tanggal 2 Desember 2021. Kegiatan rakor PPID dilaksanakan dengan mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi di seluruh Indonesia. Pada kegiatan dimaksud, hadir sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong, dan Koordinator Tata Kelola Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mulyani.



Kegiatan PPID Kemendagri Tahun 2021

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik



Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah



Asistensi Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah

5 RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri tidak mendapatkan sengketa informasi. Namun demikian terdapat 17 keberatan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh keberatan yang diterima telah diselesaikan dengan mediasi dan tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Atasan PPID Kemendagri.



No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Informasi Yang Dimohon	Alasan Keberatan
1	Andre Iansyah	04 Januari 2021	RLPPD Tahun 2015 sampai 2019	Tidak Ada Tanggapan Sampai Saat Ini
2	Fahmie Trihatin Januarsyah	16 Januari 2021	Permintaan Alamat Pemprov, Pemkot, Pemda Seluruh Indonesia	Mohon Maaf, Kok Yang Dikirim Permendagri Nomor 11 Tentang Pakaian Dinas
3	Junirianto	04 Februari 2021	Dokumen Kontrak Pengadaan/Pekerjaan	Sesuai UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Prihal Permohonan Informasi Publik Saya Tidak Merespon
4	Muhlisin	16 Februari 2021	Keuangan PT Sakae Riken Indonesia di Kabupaten Karawang	Mohon Pelayanannya Ditingkatkan
5	Rudolf Yonathan Makuba	23 Februari 2021	SK Pelantikan Bupati Kab. Mamberamo Raya Provinsi Papua	Lama Sekali Tunggunya
6	Asaeli Gea	14 Maret 2021	Surat Penegasan Dokumen Publik Desa	Mohon Tindak Lanjutnya Terima Kasih
7	Rida Desmawati	26 Maret 2021	SE Mendagri No 120/956/OTDA tgl 10 Maret 2011	Tidak ada tanggapan dari PPID Kemendagri Terkait Permintaan Kami

8	Rahmanda Widyadhari	12 April 2021	Permohonan Informasi Data Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2016-2021	Informasi berkala tidak disediakan terkait Data Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Provinsi Bangka Belitung
9	Liovina Ngalemisa Br Ginting	19 April 2021	Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Desa Rumah Lengo, Kec. STM Hulu	Halo Bapak/Ibu, dengan ini saya sampaikan bahwa, permohonan tersebut udah saya ajukan dan pihak PPID Deli serdang telah menyurati ke dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Deli Serdang, namun sudah 1 bulan lebih hingga batas waktu penelitian saya habis, tidak ada balasan email dari Dinas PMD selaku pemilik data seperti yang tertulis di surat PPID dengan tambusan ke Dinas PMD Deli Serdang
10	Filemon Nggorom	19 April 2021	Mencetak ulang KTP	KTP Sudah di Cetak Ulang
11	Lismayantie	27 April 2021	Data Pemerintah Daerah Pada Tahun 2016-2020 Yang Terindikasi Mengalami Politik Dinasti	Assalamualayukum, mohon maaf Bapak/Ibu saya ingin bertanya mengapa permohonan saya tidak dapat dipenuhi? Padahal sebelumnya pada tahun 2017 ada pemohon juga yang meminta data tentang pemerintah daerah yang terindikasi politik dinasti periode 2013-2015 dan pemohon tersebut mendapatkan datanya dari Kemendagri dengan pejabat yang dituju adalah Ditjen Otonomi Daerah. Saya juga melakukan permohonan kepada Ditjen Otonomi Daerah tetapi tidak mendapatkan informasi yang saya butuhkan mengenai data pemerintah daerah pada tahun 2016-2020 yang terindikasi mengalami politik dinasti

12	Ida Sri Margiati	27 April 2021	Hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2018, 2019, dan 2020	permohonan saya lama tidak ditanggapi, apakah karena membutuhkan waktu lebih lama atau alur permohonan saya salah? saya membutuhkan informasi tersebut untuk kebutuhan penelitian saya, terima kasih
13	Reita Ayu Azzahra	19 Mei 2021	Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Mohon segera di tanggap, terima kasih
14	Yoga Pratama	13 Juli 2021	Prioritas Alokasi Anggaran untuk pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten/ Kota	Mohon segera di tanggap, terima kasih
15	Opan Magpur	03 September 2021	Permohonan Aplikasi Pengecekan NIK Online bagi warga Masyarakat	Mohon Untuk Bisa Lebih Mudah Lagi, Karena Kami Bukan Hanya Mengurus Permintaan Pengecekan NIK Online Dari 1 Atau 2 Orang Saja, Melainkan Satu Desa, Terima Kasih
16	Sugiyanto	27 September 2021	Pencetakan Akta Kelahiran	Akta Hilang
17	Silverius Bangun	09 Oktober 2021	Peraturan dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Staf Khusus, Tenaga Ahli di Pemerintahan Kabupaten/Kota	Pemohon sampai dengan saat ini tidak mendapat penjelasan yang memadai tentang permohonan yang dimaksud. Dokumen yang dimintakan tidak diberikan

6 | KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2021, Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri selalu berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dari setiap unit kerja Eselon I dan Biro/Pusat di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan juga rapat koordinasi secara rutin untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelayanan informasi publik untuk kemudian dapat diperbaiki ke depan sebagai berikut:

1. Kendala Internal

- a. Respon PPID Pelaksana di lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam menindaklanjuti setiap permohonan informasi publik masih kurang cepat, responsive dan tuntas;
- b. Penyesuaian organisasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi karena berdampak pada perubahan person in charge. Sehingga pemahaman atau pengetahuan PIC harus dimulai dari awal saat pergantian pada Jabatan yang baru;
- c. PPID Pelaksana masih menganggap bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan yang membebani tugas, pokok dan fungsi utama pada komponen atau Biro/Pusat. Hal ini terjadi karena dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk mesti ada desakan dari PPID Utama;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Utama memiliki tenaga yang diperbantukan untuk melayani Permohonan Informasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan situasi yang menunjukkan perlunya tambahan personil yang secara khusus bertugas melayani permohonan informasi dan melakukan koordinasi-koordinasi yang dibutuhkan demi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan akuntabel;

- a. PPID Pelaksana masih belum memahami klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu cenderung ragu untuk menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan
- b. Masih kurangnya komitmen pimpinan unit kerja untuk secara sadar membuka akses informasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat.

2. Kendala Eksternal

Masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme menyampaikan permohonan informasi. Sehingga permohonan informasi yang disampaikan tidak lengkap dan jelas khususnya terkait informasi apa yang diminta. Selain itu masyarakat masih belum bisa membedakan antara lama website PPID Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perlu dilakukan sosialisasi secara dengan menggunakan media yang lebih ramah pengguna dan Bahasa yang sederhana agar masyarakat lebih memahami prosedur pelayanan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik



7 | REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFOMASI PUBLIK



Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun langkah rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dan saran dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi selama tahun 2021. Hal-hal yang dirubah pada rancangan peraturan tersebut terutama menyangkut struktur kelembagaan PPID di tingkat Kabupaten/Kota yang semula melekat pada jabatan struktural Eselon III yang membidangi Pengelolaan informasi, dokumentasi dan kehumasan menjadi pejabat Eselon II, kelembagaan PPID diselaraskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan standar prosedur operasional Layanan Informasi;
2. Menginventarisir permasalahan pada Permendagri No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyediaan SOP dan disesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan asistensi peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada 5 Provinsi berdasarkan hasil monev Keterbukaan Informasi tahun 2021, yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau yang belum masuk kualifikasi informatif;
4. Mengembangkan aplikasi pengelola informasi publik yaitu ppid.kemendagri.go.id yang telah digunakan secara berbagi pakai dengan

216 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi layanan informasi publik yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu dibutuhkan aplikasi umum nasional bidang pelayanan informasi publik.

5. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan informasi publik bagi petugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

